

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan suatu perusahaan dibuat untuk menampilkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan ini digunakan oleh berbagai pihak yang sangat bervariasi untuk berbagai kepentingan yang berbeda. Beberapa pihak pengguna laporan keuangan adalah calon investor, investor, pemerintah, serta masyarakat. Calon investor dan investor, khususnya pemegang saham, merupakan salah satu pihak yang menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk membuat keputusan investasi yang baik, laporan keuangan harus disajikan dengan *fair* untuk melindungi kepentingan semua pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas.

Laporan keuangan yang tidak transparan mempunyai indikasi bahwa dalam perusahaan yang bersangkutan terdapat konflik. Karena informasi yang diberikan tidak transparan maka ada pihak-pihak (pemegang saham) yang kekurangan informasi dan menimbulkan asimetri informasi di antara mereka. Untuk mengatasi masalah asimetri informasi tersebut, dapat dilakukan dengan meningkatkan *disclosure* perusahaan yang sifatnya wajib (*mandate disclosure*) dan juga informasi tambahan (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan (Lang dan Lundholm, 1996)

Salah satu bukti empiris adanya asimetri informasi telah diungkapkan pada penelitian La Porta (2000). La Porta (2000) menemukan bahwa di berbagai negara banyak terjadi kasus ekspropriasi kekayaan dari pemegang saham minoritas kepada pemegang saham mayoritas karena pemegang saham minoritas tidak mempunyai informasi yang lengkap dan baik dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Hal ini dapat dilakukan jika pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang kuat kepada manajemen perusahaan. Perpindahan kekayaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan melakukan transaksi dengan perusahaan lain dimana pemegang saham mayoritas juga merupakan pemegang saham di perusahaan tersebut dengan memberlakukan

harga yang tidak wajar (Utama, 2006). Transaksi ini dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan namun menguntungkan bagi pemegang saham pengendali. Cheung, Rau, dan Stouratis (2006) juga mengungkapkan bukti empiris terjadinya ekpropriasi kekayaan dari pemegang saham minoritas ke pemegang saham mayoritas dengan pihak hubungan istimewa antara emiten di bursa efek Hongkong tahun 1998-2000. Cheung, Rau, dan Stouratis (2006) menambahkan bahwa ekspropriasi yang paling besar disebabkan oleh adanya *related party transaction* (RPT), meskipun tidak semua RPT dapat merugikan para pemegang saham minoritas.

Lebih lanjut La Porta (2000) mengatakan bahwa pemegang saham minoritas dapat dilindungi jika perusahaan menerapkan mekanisme *Corporate Governance* (CG). Pernyataan La Porta (2002) juga didukung oleh publikasi dari *Forum for Corporate Government in Indonesia* (FCGI, 2006), yang menyebutkan bahwa perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang minoritas, dapat diciptakan dengan menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini juga selaras dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) NOMOR KEP-06/PM/2000, yang menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan oleh emiten dan perusahaan publik harus memenuhi prinsip keterbukaan untuk mendorong terciptanya GCG.

Salah satu peraturan di Indonesia sudah mengakomodasi perlindungan bagi pemegang saham yaitu lewat peraturan Bapepam-LK nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, khususnya pada bagian transaksi dengan pihak hubungan istimewa. Menurut PSAK¹ 7 transaksi dengan pihak istimewa adalah transfer sumberdaya atau hutang antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan atau tanpa penetapan harga. Sedangkan salah satu definisi “pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa” adalah perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*). Beberapa hal harus diungkapkan dengan jelas pada laporan keuangan seperti penggolongan piutang dan hutang dengan pihak hubungan istimewa dan kebijakan harga yang berlaku

¹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

pada transaksi tersebut. Pengungkapan transaksi ini merupakan kewajiban emiten dalam menyusun laporan keuangannya. Peraturan Bapepam-LK nomor VIII.G.7 ini mewajibkan emiten untuk melaporkan hasil transaksi dengan pihak istimewa sehingga pengungkapan ini sudah tergolong dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

Pada penelitian terdahulu beberapa peneliti menduga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *disclosure* secara umum. Setianto (2005) menduga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *disclosure* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta yaitu: keberadaan komite audit, keberadaan internal audit, kategori kantor akuntan publik, dan ukuran perusahaan. Boesso dan Kumar (2006) menduga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *disclosure* perusahaan Italia dan U.S. yaitu: ukuran perusahaan, jenis industri, kompleksitas bisnis, kestabilan industri, struktur CG pada perusahaan, komitmen *stakeholders*, dan jumlah aset tak berwujud. Sedangkan Gruning (2007) meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *disclosure* perusahaan di Eropa Tengah yaitu: ukuran perusahaan, *listing status*, jenis industri, dan *home country effect*. Namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada studi yang meneliti tentang RPT *disclosure* baik tingkat RPT *disclosure* maupun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap RPT *disclosure* di Indonesia. Sehingga penulis menduga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat RPT *disclosure* yaitu: penerapan CG, ukuran perusahaan, kategori akuntan publik, dan jenis industri.

Hasil penelitian Botosan (1997) mengungkapkan bahwa perusahaan yang mempunyai penerapan CG yang baik mempunyai kualitas standar yang tinggi dalam pengungkapan dan transparansi laporan keuangan. Penelitian Klein (2002) mengungkapkan bahwa penerapan mekanisme CG berdampak pada kualitas *disclosure*. Penelitian Klein juga diperkuat oleh Kelton dan Yang (2008) yang mengungkapkan bahwa penerapan mekanisme CG mempengaruhi transparansi laporan keuangan yang dipublikasi lewat internet. Penelitian ini dilakukan dengan sampel perusahaan di NASDAQ *National market* tahun 2003. Perusahaan yang menerapkan CG berarti perusahaan tersebut sudah menerapkan aturan dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan yang disajikan

menjadi transparan. Transparansi laporan keuangan tersebut juga akan mencerminkan RPT *disclosure*.

Chow dan Wong-Boren (1997) meneliti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan perusahaan di Meksiko. Hasil penelitian Kim (2005) pada perusahaan Korea tahun 2002 mengungkapkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, yang diwakili oleh total asset, mempunyai index transparansi keuangan semakin baik. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Setianto (2005) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang diwakili oleh nilai kapitalisasi pasar, mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib. Perusahaan yang memiliki *market capitalization* besar di pasar modal berarti dimiliki oleh banyak *shareholders*. *Shareholders* tersebut juga bertindak sebagai pengawas kegiatan perusahaan, sehingga pengawas perusahaan menjadi banyak dan perusahaan dituntut untuk menyajikan *disclosure* yang transparan termasuk bagian RPT *disclosure*.

Zeff (2003) meneliti bahwa kebijakan awal perusahaan Du Pont's merotasi eksternal audit adalah untuk mendapatkan hasil audit yang tidak memiliki konflik kepentingan, sehingga hasil audit menjadi lebih *fair*. Kebijakan ini juga untuk menghindari kolusi antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal audit. Setelah tahun 1954 Du Pont's menunjuk Price, Waterhouse & Company, yang tergolong dalam *the big-four*, sebagai eksternal auditor yang tetap. Hasil penelitian Chung, Firth dan Kim (2005) menunjukkan bahwa hasil audit oleh pihak eksternal yang digolongkan dalam *the big-six*, mempunyai kualitas audit yang lebih baik dalam mengaudit hubungan *high free cash flow* (SFCF) dengan *income-increasing discretionary accruals* (DAC) dalam perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang kecil. Penelitian Setianto (2005) tentang pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta tahun 2002 dan 2003 mengungkapkan bahwa kategori kantor akuntan publik mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan yang bersifat wajib. Kantor akuntan publik yang tergolong dalam *the big-four* tentu mempunyai reputasi yang baik dalam melakukan kegiatan auditnya dan akan terus mempertahankan *image* yang sudah terbentuk. Dengan begitu hasil audit

perusahaan yang dilakukan oleh KAP *the big-four* diduga akan mempunyai tingkat RPT *disclosure* yang lebih baik daripada yang diaudit oleh KAP *non big-four*.

Meek (1995) menemukan bahwa tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan multi nasional di Amerika, Inggris Raya dan Benua Eropa. Kim (2005) memformulasikan suatu index untuk mengukur tingkat transparansi laporan keuangan pada perusahaan Korea tahun 2002. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, telekomunikasi, dan elektronik (ketiga industri tersebut, khususnya keuangan, mempunyai regulasi yang ketat dari pemerintah) mempunyai index transparansi tinggi. Sedangkan perusahaan yang berada pada industri transportasi, konstruksi, kertas mempunyai index transparansi yang rendah. Perusahaan yang berada pada industri yang *regulated* (misalkan sektor perbankan) diduga akan mempunyai hasil laporan keuangan yang lebih transparan dibandingkan dengan industri lainnya karena setiap kegiatan usahanya akan selalu diawasi oleh pembuat regulasi. Perusahaan yang tergolong dalam *regulated industry* juga diduga mempunyai tingkat RPT *disclosure* yang lebih baik daripada *unregulated industry*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa faktor-faktor tersebut diduga dapat menjelaskan bagaimana pengaruh berbagai variabel terhadap pengungkapan RPT. *Pertama*, semakin tinggi penerapan CG, yang diwakili oleh skor CGI, dapat berdampak positif terhadap tingkat RPT *disclosure*. *Kedua*, semakin besar ukuran perusahaan yang diwakili oleh nilai kapitalisasi pasar di bursa efek akan berdampak positif terhadap tingkat RPT *disclosure*. *Ketiga*, perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang tergolong dalam *the big-four*, akan mempunyai tingkat RPT *disclosure* yang lebih baik daripada yang diaudit oleh *non big-four*. *Keempat*, perusahaan yang bergerak pada *regulated industry* akan mempunyai tingkat RPT *disclosure* yang lebih baik dari pada *unregulated industry*.

Faktor lain yang akan ditambahkan adalah jumlah dalam penelitian ini adalah nilai RPT² yang dari perusahaan-perusahaan yang diteliti. Diduga bahwa semakin besar nilai RPT yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin besar tingkat RPT *disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga faktor *kelima* adalah, semakin besar nilai RPT maka akan berdampak positif terhadap tingkat RPT *disclosure*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006?
2. Apakah penerapan CG (yang diwakili dalam *Corporate Government Index* (CGI)), berpengaruh pada tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006?
3. Apakah ukuran perusahaan, berpengaruh pada tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006?
4. Apakah tingkat RPT *disclosure* yang diaudit oleh KAP *the big-four* lebih baik daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big-four* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006?
5. Apakah tingkat RPT *disclosure* perusahaan yang tergolong dalam *regulated industry* lebih baik daripada perusahaan yang tergolong dalam *unregulated industry* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006?
6. Apakah nilai RPT berpengaruh pada tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006?
7. Apakah penerapan CG (yang diwakili dalam *Corporate Government Index* (CGI)), ukuran perusahaan, skala KAP, regulasi, dan nilai RPT dalam industri

² Nilai RPT yang digunakan adalah nilai *sales + expense to equity* yang mengacu pada penelitian Loviana (2008). Penelitian ini dengan penelitian Loviana merupakan penelitian bersama dan akan dilihat hubungan dari kedua penelitian ini.

secara bersama-sama berpengaruh pada tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diungkapkan pada perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.
2. Memperoleh bukti empiris bahwa penerapan CG (yang diwakili dalam *Corporate Government Index* (CGI)), berpengaruh terhadap tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.
3. Memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.
4. Memperoleh bukti empiris bahwa tingkat RPT *disclosure* perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big-four* akan lebih baik daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big-four* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.
5. Memperoleh bukti empiris bahwa tingkat RPT *disclosure* perusahaan yang tergolong dalam *regulated industry* akan lebih baik daripada perusahaan tergolong dalam *unregulated industry* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.
6. Memperoleh bukti empiris bahwa nilai RPT berpengaruh terhadap tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.
7. Memperoleh bukti empiris bahwa penerapan CG (yang diwakili dalam *Corporate Government Index* (CGI)), ukuran perusahaan, skala KAP, regulasi dan nilai RPT secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat RPT *disclosure* dalam laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang RPT yang dilakukan merupakan salah satu penelitian pertama yang dilakukan di Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar dan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Empirikal. Penelitian ini merupakan penelitian pertama di Indonesia dan merupakan *joint research* dengan penelitian Loviana³ (2008), sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu literatur utama yang dapat menjadi acuan untuk penelitian RPT lebih lanjut.
2. Investor. Yaitu untuk memberikan perlindungan dari informasi RPT, sehingga pertimbangan atas keputusan investasi, seperti pemilihan portfolio dan analisis nilai saham, dapat dilakukan dengan tepat karena reabilitas laporan keuangan akan semakin tinggi. Investor juga dapat mengetahui prospek pertumbuhan perusahaan yang sudah menjalani praktik CG dengan baik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai monitoring perusahaan.
3. Bapepam-LK. Yaitu untuk mengevaluasi ketaatan perusahaan dalam menjalankan peraturan Bapepam-LK nomor VIII.G.7 khususnya pada bagian transaksi hubungan istimewa.
4. Perusahaan. Yaitu sebagai acuan untuk memperbaiki secara berkelanjutan proses pelaporan transaksi keuangannya sehingga dapat mencapai tingkat pengungkapan yang maksimal.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub-bab. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan konsep dan teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan.

³ Loviana (2008) meneliti tentang *sales+expense to equity* dan *asset+liability to equity* RPT.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi menguraikan tentang perumusan hipotesis penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tentang sampel penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian dan pengukurannya, serta metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data empiris dan variabel penelitian dan analisis regresi linier.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan juga saran bagi pihak yang berkepentingan atas penelitian ini. Selain itu penulis mencoba memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

